

**UPAYA PEMERINTAH DAN KAUM EKSIL DALAM MENGUSAHAKAN
KEPULANGAN KE INDONESIA (1998–2004)**



Tiara Nur Aini

1403621065

Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2025

ABSTRAK

Tiara Nur Aini, Upaya Pemerintah dan Kaum Eksil dalam Mengusahakan Kepulangan ke Indonesia (1998–2004). **Skripsi**. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif-naratif upaya kaum eksil dan pemerintah terhadap hak eksil untuk dapat kembali ke Indonesia, terutama dalam mendapatkan hak kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode historis, sesuai dengan Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah yang membagi langkah-langkah penelitian sejarah menjadi lima tahapan, yaitu penentuan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan terakhir penulisan sejarah. Penelitian ini dibatasi oleh pembatasan temporal dan spasial, di mana batasan temporal yang dibahas dimulai sejak tahun 1998 ketika mundurnya kekuasaan Soeharto dan dimulainya masa reformasi, sampai dengan tahun 2004 saat berakhirnya masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sementara, batasan spasial penelitian ini yaitu fokus membahas mengenai kaum eksil yang menetap di luar negeri dan mendapatkan suaka di Prancis, Belanda, Jerman, dan Swedia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setelah era reformasi dimulai, pendekatan antara kaum eksil dan pemerintah mulai terjalin. Pada masa Abdurrahman Wahid pemerintah mulai membuka ruang komunikasi dengan menyelenggarakan forum diskusi di Belanda bersama sejumlah eksil untuk membahas pembentukan kebijakan pemulangan eksil dan pemulihan status kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan serupa dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya, Megawati Soekarnoputri ketika menjabat mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan memberi ruang kemudahan bagi eksil yang ingin kembali ke Tanah Air dan memulihkan kewarganegaraannya. Namun praktiknya tidak berjalan dengan lancar dan cenderung stagnan sehingga untuk mengatasi keterbatasan hukum, para eksil memutuskan untuk menempuh strategi naturalisasi menjadi warga negara asing untuk dapat mengatasi hambatan administratif dalam mengunjungi Indonesia. Meski demikian, mereka tetap aktif menyuarakan pentingnya rekonsiliasi dan pengakuan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 hingga ke forum internasional, sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran Ibrahim Isa di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Kata Kunci: Eksil, Rekonsiliasi, Pemerintah

ABSTRACT

Tiara Nur Aini, *Upaya Pemerintah dan Kaum Eksil dalam Mengusahakan Kepulangan ke Indonesia (1998–2004)*. **Thesis**. Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, Jakarta State University, 2025.

This research aims to explain descriptively-narratively the efforts of exiles and the government towards the rights of exiles to be able to return to Indonesia, especially in obtaining citizenship rights. This research uses the historical method by Kuntowijoyo in his book Introduction to Historical Science, which divides the steps of historical research into five stages, namely determining the topic, heuristics or collecting sources, verification or criticism of sources, interpretation, and finally writing history. This research is limited by temporal and spatial restrictions, where the temporal restrictions discussed began in 1998 when Soeharto's power resigned and the reformation period began, until 2004, when Megawati Soekarnoputri's reign began. Meanwhile, the spatial limitation of this research is that it focuses on exiles who live abroad and seek asylum in France, the Netherlands, Germany, and Sweden. Based on the results of this research, it can be concluded that after the reform era began, the approach between the exiles and the government began to be established. During Abdurrahman Wahid's time, the government began to open a communication space by organizing a discussion forum in the Netherlands with a number of exiles to discuss the formation of exile repatriation policies and the restoration of Indonesian citizenship status. A similar policy was continued during the next administration, when Megawati Soekarnoputri passed Law No. 27/2004 on the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and made it easier for exiles who wanted to return to the country and restore their citizenship. However, the practice did not run smoothly and tended to stagnate, so to overcome the limitations of the law, the exiles decided to take the strategy of naturalizing as foreign citizens to be able to overcome administrative obstacles in visiting Indonesia. Nevertheless, they continue to actively voice the importance of reconciliation and recognition of the 1965 human rights violations to international forums, as demonstrated by Ibrahim Isa's presence at the United Nations High Commission on Human Rights in Geneva.

Keywords: Exile, Reconciliation, Government

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta



Firdaus Wajidi, S.T.I., MA., Ph.D.
198107182008011016

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang Dr. Nur'aini Marta, S.S., M.Hum. NIP. 197109222001122001		6/8/2025
2.	Sekretaris Firdaus Hadi Santosa, M.Pd. NIP. 199301092022031006		4/8/2025
3.	Pembimbing I Humaidi, S.Pd., M.Hum. NIP. 198112192008121001		5/8/2025
4.	Pembimbing II Dr. Kurniawati, M.Si. NIP. 197708202005012002		5/8/2025
5.	Penguji Ahli I M. Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum. NIP. 197601302005011001		4/8/2025

Tanggal Lulus: 28 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Nur Aini

Nomor Registrasi : 1403621065

Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah FISH UNJ

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Pemerintah dan Kaum Eksil dalam Mengusahakan Kepulangan ke Indonesia (1998–2004)”, dengan adanya lembar orisinalitas ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang dibuat oleh diri saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi referensi dalam penelitian ini saya cantumkan dan nyatakan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Juli 2025



Tiara Nur Aini

NIM. 1403621065



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Nur Aini
NIM : 1403621065
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah
Alamat Surel : tiaranuraini253@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul: **Upaya Pemerintah dan Kaum Eksil dalam Mengusahakan Kepulangan ke Indonesia (1998–2004)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2025

Tiara Nur Aini

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)



*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua serta seluruh anggota keluarga yang
senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan doa yang tak pernah putus
sepanjang proses penyusunan skripsi ini.*

PRAKATA

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya telah memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah dan Kaum Eksil dalam Mengusahakan Kepulangan Eksil ke Indonesia (1998–2004)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi, arahan, serta bantuan moril dan intelektual yang diberikan oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini:

Bapak Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Ibu Dr. Nur’aeni Marta, S.,S., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Bapak Humaidi, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Kurniawati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan serta masukan berharga sepanjang proses penulisan skripsi ini. Bapak Muhammad Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum. selaku Penguji Ahli dan Bapak Firdaus Hadi Santosa, M.Pd. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, yang selama ini telah mendedikasikan ilmu dan pengalamannya melalui berbagai mata kuliah yang menunjang proses akademik penulis. Penulis juga memberikan apresiasi khusus kepada Ibu Sri Tunruang, salah satu eksil yang menjadi

narasumber dalam penelitian ini, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman hidup serta perspektif yang kaya makna, membantu dalam memperdalam pemahaman penulis selama proses pengumpulan data.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sukino dan Ibu Sunarsih, atas cinta kasih, doa yang tiada henti, serta dukungan moral dan material yang menjadi fondasi utama dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis juga berterima kasih kepada kedua kakak dan adik penulis yang selalu hadir memberikan semangat, penghiburan, dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, khususnya kepada Hardini Rahardyanti, Siti Anggraeni, Siti Nuraini, Syifa Aulia, dan Ananda Ayudia, yang telah menjadi sumber semangat, tempat bertukar pikiran, serta memberikan dukungan yang berarti sejak awal perjalanan studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca guna meningkatkan kualitas karya ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Bekasi, 28 Juli 2025

Tiara Nur Aini

DAFTAR ISTILAH

Avonturisme	: Kecenderungan melakukan tindakan ekstrem ke kiri tanpa mempertimbangkan kesiapan situasi secara objektif
Eksil	: Orang yang berada di luar negeri karena terpaksa meninggalkan negaranya, biasanya karena alasan politik atau pengasingan paksa. Dalam konteks Indonesia, "eksil 1965" merujuk pada mereka yang tak bisa pulang akibat dicap komunis pasca peristiwa G30S.
Komunisme	: Ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki secara kolektif dan kekayaan didistribusikan secara merata.
Leninisme	: Konsep politik yang muncul berdasarkan pemikiran Vladimir Lenin yang menekankan peran partai revolusioner sebagai pelopor kelas pekerja.
Marxisme	: Teori sosial dan ekonomi yang dikembangkan Karl Marx, menekankan konflik antara kelas pekerja (proletariat) dan pemilik modal

(borjuis), yang akan berakhir pada revolusi dan terciptanya masyarakat tanpa kelas.

Perestroika : Kebijakan reformasi ekonomi dan politik di Uni Soviet pada era Mikhail Gorbachev (1980-an) yang bertujuan memperbaiki sistem sosialis dengan memperkenalkan unsur pasar bebas dan transparansi.

Political Will : Komitmen nyata dari pemegang kekuasaan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah publik, termasuk isu hak asasi manusia, rekonsiliasi, dan kepulangan eksil.

Pre-medikasi : Pemberian obat sebelum prosedur medis, seperti operasi, untuk mencegah efek samping atau menenangkan pasien.

Prinsip no-refoulement : Prinsip hukum internasional yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke negara asal jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi.

Refugee	: Seseorang yang melarikan diri dari negara asalnya karena konflik, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia, dan mencari perlindungan di negara lain.
Rekonsiliasi	: Proses pemulihan hubungan yang retak atau konflik antara dua pihak, seperti negara dan warganya, melalui pengakuan, permintaan maaf, atau kebijakan pemulihan keadilan.
Rese Dokument	: Dokumen perjalanan untuk penerima suaka.
Sino-Soviet Split	: Perpecahan ideologis dan politik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet pada tahun 1950-an–1960-an yang mempengaruhi perpecahan dalam gerakan komunis internasional, termasuk di Indonesia.
Sosialisme	: Sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.
Stateless	: Kondisi di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BBM	: Bahan Bakar Minyak
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FPIS	: Front Pembela Islam Surakarta
FUI	: Front Umat Islam
G30S	: Gerakan 30 September
HAM	: Hak Asasi Manusia
IISH	: <i>International Institute of Social History</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KI	: <i>Komitee Indonesië</i>
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

MAHMILUB : Mahkamah Militer Luar Biasa

MPR RI : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

PAN : Partai Amanat Nasional

PBB : Partai Bulan Bintang

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

PHK : Pemutusan Hubungan Kerja

PPP : Partai Persatuan Pembangunan

PKB : Partai Kebangkitan Bangsa

PKI : Partai Komunis Indonesia

USDEK : Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia

WNA : Warga Negara Asing

WNI : Warga Negara Indonesia



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode dan Bahan Sumber	11

BAB II: KEHIDUPAN KAUM EKSIL PADA MASA ORDE BARU16

A. Mereka yang Terbuang	16
B. Sebaran Negara-negara Penerima Suaka Kaum Eksil Bermukim	18
1. Belanda.....	28
2. Jerman Barat.....	29
3. Prancis	30
4. Swedia	31
C. Kehidupan Kaum Eksil di Pengasingan.....	32

**BAB III: UPAYA REKONSILIASI PEMERINTAH DAN EKSIL DALAM
MENGATASI NASIB KAUM EKSIL DI TAHUN 1998-2004.....51**

A. Masa Reformasi dan Jatuhnya Kepemimpinan Soeharto.....	51
B. Kebijakan Pemerintahan Reformasi terhadap Upaya Rekonsiliasi dengan Eksil (1998–2004)	57
1. Masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999).....	58
2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) 61	
3. Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)	73
C. Upaya Kepulangan Kaum Eksil di Masa Reformasi (1998-2004).....	76

BAB IV: KESIMPULAN.....86

DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	98
RIWAYAT HIDUP	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertemuan antara Delegasi Komite Sentral Partai Komunis Indonesia dengan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.....	23
Gambar 2.2 Kondisi Restaurant Indonesia	34
Gambar 2.3 Sarmadji dengan dokumentasi arsip miliknya.....	42
Gambar 2.4 Syarkawi Manap dan Keluarga.....	47
Gambar 3.1 Surat pernyataan kesetiaan kepada Presiden Soekarno	79



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data sejumlah eksil yang bermukim di Belanda, Prancis, Jerman, dan Swedia dalam melakukan kunjungan ke Indonesia.....	81
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000	98
Lampiran 2: Foto Bersama Ibu Sri Tunruang Selaku Narasumber Terkait Upaya Rekonsiliasi Pemerintah dan Eksil di Era Reformasi (1998-2004) ..	98
Lampiran 3: Transkrip Wawancara Skripsi	99

